RISIKO MELEKAT:

RENCANA APRIL UNTUK EKSPANSI BUBUR KERTAS MEMBAWA RISIKO KEUANGAN MATERIAL BAGI BANK DAN INVESTOR

Desember 2021

Briefing ini disiapkan oleh Koalisi Forests & Finance
(Rainforest Action Network, TuK Indonesia, Profundo, Amazon Watch, Repórter Brasil, BankTrack, Sahabat Alam Malaysia and Friends of the Earth US)

Didukung oleh:

Auriga

Environmental Paper Network (EPN)

Koalisi Aksi Rimba Rakyat (KOARR)

Responsibank Indonesia Coalition

RINGKASAN EKSEKUTIF

Asia Pacific Resources International (APRIL), salah satu perusahaan bubur kertas *(pulp)* dan kertas *(paper)* terbesar di dunia, bagian dari Grup Royal Golden Eagle (RGE), memiliki rekam jejak deforestasi dan pelanggaran HAM pada seluruh kegiatan operasionalnya di Indonesia. APRIL pernah meningkatkan kapasitas pengolahan pabrik bubur kertasnya melebihi kemampuan pasokan dari hutan tanamannya dalam menghasilkan serat kayu yang memenuhi prinsip keberlanjutan. Dan, defisit ini telah mendorong deforestasi.

Pada 2015, APRIL meluncurkan Kebijakan Manajemen Hutan Lestari 2.0 (*Sustainable Forest Management Policy* /SFMP 2.0) yang berkomitmen untuk melindungi hutan dan menyelesaikan konflik masyarakat diantara ikrar (atau janji) lainnya. Kebijakan tersebut termasuk kriteria pemenuhan bahan baku serat kayu secara mandiri sebelum memperlebar kapasitas *pulp* dari pabrik pengolahan.

APRIL belum mencapai target pemenuhan bahan bakunya sampai sekarang. APRIL juga belum membuat kemajuan yang signifikan pada beberapa pilar SFMP 2.0. Model bisnis yang dijalankan selama ini justru membuat risiko sosial dan lingkungan seolah menjadi bagian dari operasional kegiatan usahanya. Kini, APRIL kembali mengabaikan komitmen keberlanjutannya setelah merencanakan untuk meningkatkan secara dramatis kapasitas pabrik *pulp*-nya di Kerinci, Provinsi Riau, Indonesia, sebesar 55%. Akibatnya, kebutuhan serat kayu tahunan akan meningkat dari 13 juta ton menjadi 20 juta ton.

APRIL dikabarkan sedang berupaya mendapat pinjaman sebesar USD 650 juta dari bank-bank internasional. Sementara anak perusahaan APRIL, yaitu Asia Pacific Rayon, yang berproduksi di lokasi yang sama, baru-baru ini mendapatkan pinjaman sindikasi sebesar USD 300 juta untuk ekspansi produksi (lihat Bagian 1.3). Laporan terbaru menyebutkan bahwa operasi lini bisnis *pulp* RGE juga berkembang secara internasional. Padahal sebelumnya, bank yang terpapar pembiayaan ekspansi RGE dilaporkan menderita kerugian besar setelah APRIL dikeluarkan dari Bursa Efek New York pada tahun 2001. Kemudian, Pemerintah Indonesia, dan berbagai kreditur nasional maupun internasional juga merestrukturisasi utangnya.

Briefing ini fokus pada risiko finansial material dari berkurangnya pengembalian atau kerugian kredit kepada bank-bank yang turut serta membiayai Grup APRIL dan lini bisnis *pulp and paper* dari RGE. Briefing berisi data dan analisis yang relevan untuk menilai risiko menyeluruh dari ekspansi ini terhadap APRIL secara utuh. Risiko-risiko ini tidak secara lengkap diungkapkan dalam publikasi perusahaan dan Laporan Keberlanjutan APRIL yang tersedia untuk umum.

Sangat penting bagi bank, investor, dan regulator Indonesia untuk menyadari bahwa kebutuhan serat kayu APRIL terus bergantung pada sumber daya dengan risiko inheren yang memicu krisis kebakaran dan kabut asap di Indonesia, menghasilkan gas rumah kaca dalam jumlah besar dan terganggunya pasokan. Alih-alih mengakui dan memitigasi risiko ini, APRIL berencana untuk meneruskan dan meningkatkan pasokannya dari sumber yang bermasalah dengan meningkatkan kebutuhan serat kayu tahunan sebesar 55%.

Temuan Utama:

- **Dampak kegiatan usaha APRIL pada lahan gambut dan persoalan iklim meningkatkan risiko hukum, risiko pasokan, dan risiko operasional**

  Sekitar sepertiga dari wilayah konsesi yang memasok kebutuhan APRIL berada di lahan gambut yang kaya karbon. Ketika dikonversi dan dikeringkan untuk hutan tanaman, area ini melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca melalui kebakaran dan mengakibatkan penurunan tanah. APRIL mengklaim telah menghitung perkiraan emisi ini, tetapi belum mempublikasikannya. Berdasarkan analisis geospasial dan penelitian ilmiah yang termutakhir, kami memperkirakan bahwa lahan gambut dalam basis pasokan serat kayu APRIL menghasilkan sekitar 100 juta ton ekuivalen CO2 antara 2015-2019. Angka ini setara dengan lebih dari 40% emisi nasional tahunan Filipina, dengan populasi lebih dari 100 juta orang.

  Indonesia tidak dapat mengatasi emisi nasional atau krisis kebakaran dan kabut asap tanpa langkah-langkah kuat untuk meningkatkan muka air lahan gambut dan memulihkan sebagian besar lahan gambut yang dikeringkan oleh kegiatan perkebunan dan hutan tanaman. Basis hutan tanaman APRIL sangat rentan terhadap tindakan restorasi tersebut. APRIL sebelumnya bahkan pernah menggugat Pemerintah Indonesia terkait dengan kebijakan perlindungan lahan gambut dengan alasan bahwa hal itu akan sangat mempengaruhi produksi mereka. Kami memperkirakan, APRIL akan kehilangan lebih dari 25% area tanamnya jika Pemerintah memberlakukan kembali ketentuan perlindungan lahan gambut seperti yang diterapkan pada tahun 2016, ketika berusaha mengatasi krisis kebakaran dan kabut asap tahun sebelumnya.

  Indonesia mengklaim telah memenuhi 85% dari pengurangan emisinya berdasarkan Perjanjian Iklim Paris dengan mengurangi emisi dari Kehutanan dan Perubahan Penggunaan Lahan. Rencana APRIL untuk mengintensifkan pertumbuhan tanaman di lahan gambut yang dikeringkan akan menambah emisi saat ini dan meningkatkan risiko kebakaran, sehingga dapat melemahkan komitmen Indonesia berdasarkan Perjanjian Iklim Paris.

- **Kurangnya informasi mengenai rencana jangka panjang pasokan serat kayu yang kredibel merupakan risiko pasokan, risiko reputasi, dan risiko pasar**

  APRIL belum menyajikan informasi mengenai rencana pasokan serat kayu jangka panjang yang kredibel yang menunjukkan bagaimana APRIL akan mencukupi pasokan kayu bagi pabrik yang kapasitasnya diperbesar. Rencana yang disampaikan kepada Pemerintah Indonesia menunjukkan peningkatan 55% pasokan kayu dari semua kategori pemasok, hal ini mengingkari kebijakan keberlanjutannya sendiri, SFMP 2.0, yang mengatur mengenai pemenuhan bahan baku secara mandiri.

  Jika ekspansi pabrik berlanjut, pemenuhan bahan baku APRIL secara mandiri berkurang secara signifikan pada tahun 2025 dan akan lebih bergantung pada pasar terbuka dan impor, yang meningkatkan risiko deforestasi dan risiko konflik lahan. Jika historis tren atas pasokan kayu ini terus berlanjut, kami memperkirakan APRIL tidak akan dapat memenuhi kebutuhan serat kayunya, bahkan meski mengandalkan

sumber pasokan lain; apalagi saat grup sudah dalam posisi 'tidak terpenuhi'. Langkah yang bisa dilakukan APRIL adalah mendapatkan area hutan tanaman baru; yang besar kemungkinan tumpang tindih dengan hutan alam dan lahan yang dikelola masyarakat.

Kedua skenario ini berisiko pada hilangnya akses pasar karena adanya prinsip 'tanpa deforestasi' yang diadopsi secara luas oleh pembeli mereka. Ketika ditanya mengenai rencana pasokannya, APRIL menyatakan bahwa saat ini mereka tidak memiliki rencana untuk mengajukan izin konsesi tanaman industri baru atau memperluas wilayah konsesinya, dan bahwa serat kayu untuk memenuhi usulan perluasan pabrik akan sepenuhnya berasal dari rantai pasokan yang ada.

Kebijakan dan prosedur operasi standar (SOP) APRIL saat ini tidak memadai untuk mencegah deforestasi, dan tidak sejalan dengan standar global yang muncul dari Pendekatan Stok Karbon Tinggi (HCSA).

- **Konflik sosial yang berkepanjangan merupakan risiko operasional, risiko pasokan, dan risiko reputasi**

  Sejak meluncurkan Kebijakan Keberlanjutan 2015, APRIL belum memperlihatkan kemajuan signifikan dalam menyelesaikan konflik dan sengketa aktif dengan lebih dari 72 desa di seluruh wilayah kerja hutan tanaman dan afiliasinya. Memperluas produksi dengan begitu banyak konflik yang berkepanjangan berarti meningkatnya risiko sosial yang timbul dari sengketa tenurial, protes, dan dampak operasional lainnya.

1.1 RISIKO DARI TERPAPARNYA LAHAN GAMBUT

A. Emisi dari perubahan peruntukan lahan, api, dan asap lintas batas

Emisi dari lahan gambut yang kaya karbon melepaskan 1,3 gigaton CO2e ke atmosfer setiap tahun[1], atau setara dengan 5,6% emisi global. Indonesia menyumbang sekitar 36% emisi tersebut dari lahan gambut tropis global, yang dapat menyerap karbon dalam jumlah yang sangat besar yaitu sekitar 28 gigaton.[2] Pembukaan, pengeringan, dan pembakaran lahan gambut ini merupakan pendorong utama emisi gas rumah kaca Indonesia (tergambar dalam FOLU dan kebakaran gambut pada Gambar 1)[3]. Indonesia adalah salah satu dari 10 negara penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca global dan emisinya terus meningkat.[4]

Gambar 1 - Sumber Emisi Indonesia (laporan dua tahunan Indonesia kepada UNFCCC ke-2, 2018)

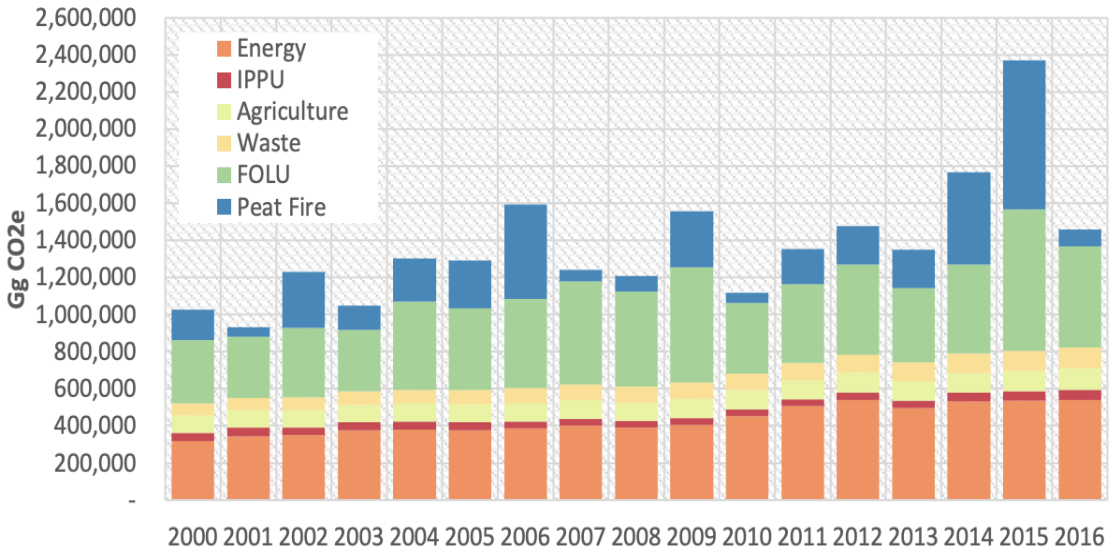

Penurunan emisi dari perubahan penggunaan lahan dan hutan adalah komponen utama strategi Pemerintah Indonesia untuk memenuhi komitmen Perjanjian Iklim Paris. Sebesar 85% penurunan emisi diproyeksi dapat dicapai oleh Pemerintah secara mandiri, tanpa bantuan internasional.[5] Strategi Pemerintah untuk mengurangi emisi dan kebakaran di Indonesia akan memerlukan restorasi lahan gambut yang telah dikeringkan di area perkebunan yang luas. Proses pembasahan dan penghijauan kembali ini pasti akan mengurangi lahan akasia dan menghambat produktivitas tanaman industri. Rencana *Nationally Determined Contribution*/NDC dan aturan perundangan saat ini menyebutkan bahwa Pemerintah akan melakukan restorasi 1,2 juta hektare lahan gambut pada tahun 2024 dan 2 juta hektare pada tahun 2030.[6] Sebagian besar areal restorasi ini berada di dalam konsesi *pulp* dan kelapa sawit.[7]

Sekitar 32% dari total area konsesi yang memasok APRIL terletak di lahan gambut. Selama lima tahun terakhir, 2015-2019, pengeringan dan oksidasi lahan gambut ini diperkirakan telah menghasilkan 74 juta ton ekuivalen CO2, lebih dari emisi nasional Austria tahun 2018, negara dengan penduduk lebih dari 8 juta jiwa.[8] Konsesi APRIL juga memiliki risiko kebakaran yang sangat tinggi, terbakar setiap tahunnya dalam kurun waktui 2015-2019, dan menerima 12 sanksi perdata yang mengakibatkan penghentian kegiatan operasionalnya selama tiga tahun di beberapa daerah.[9] Dalam Laporan Keberlanjutan Tahun 2020-nya, APRIL mengungkapkan bahwa pihaknya kembali menerima sanksi perdata akibat kebakaran lahan gambut.[10]

Analisis geospasial dari *Trase.earth* memperkirakan pada periode 2015-2019, sekitar 55.000 ha lahan telah terbakar di dalam konsesi anak perusahaan dan afiliasi APRIL. Sekitar setengahnya berada di lahan gambut. Kami memperkirakan, api dari lahan gambut menambah total emisi dari lahan gambut milik APRIL yang telah mencapai 26 juta ton ekuivalen CO_2 selama 5 tahun.[11] Jadi, secata total, emisi GRK kotor APRIL dari lahan gambut saja, diperkirakan lebih dari 100 juta ton ekuivalen CO_2, hampir setara dengan emisi tahunan 117 pembangkit listrik tenaga batu bara yang akan dibangun di Indonesia.[12] Angka ini tidak termasuk emisi dalam jumlah besar yang berasal dari kebakaran lahan non-gambut atau emisi dari lahan gambut di luar batas areal tanaman yang ikut terdampak

karena kegiatan pengeringan lahan. Selain itu, estimasi ini juga tidak mewakili penghitungan karbon secara menyeluruh, termasuk dari rantai pasokannya yang akan mencakup sumber emisi lain, serta penyerapan dari hutan tanaman industrinya.

APRIL mengklaim telah melakukan perhitungan karbon pada tahun 2019, tetapi mereka hanya membuka perhitungan terkait dengan emisi pabriknya yang disebutkan sebesar 2,2 juta ton CO2e. [13] APRIL mengabaikan perkiraan emisi dari perubahan penggunaan lahan, yang diakuinya sendiri sebagai sumber emisinya yang terbesar (kami memperkirakan faktor ini setidaknya mencapai 8x lipat emisi tahunan dari pabriknya).[14] Berdasarkan hal itu, dapat dikatakan APRIL belum mampu memenuhi kebijakan SFMP 2.0-nya sendiri untuk "melacak emisi karbonnya dan melaporkan kemajuan dalam mengurangi jejak karbonnya secara menyeluruh", yang membuat komitmennya untuk "mengurangi jejak karbonnya secara berkelanjutan" seolah tidak ada artinya.[15]

"Sumber terbesar GRK (Cakupan 1 dan Cakupan 2) Grup APRIL adalah emisi yang dihasilkan dari perubahan peruntukan lahan" – Laporan Keberlanjutan APRIL 2020

Kami sampaikan penilaian kami terkait emisi GRK dari lahan gambut seperti yang dijelaskan di atas kepada APRIL untuk dikomentari dan meminta agar APRIL membagikan dokumen analisis mereka. APRIL menjawab, "Kami tidak mempublikasikan tingkat emisi yang ada di data dasar saat ini, tetapi kami dapat memberikan beberapa indikator umum." Selain itu, APRIL menyebut beberapa proyek restorasi gambut, strategi mitigasi kebakaran, dan mengakui, "Secara global, lahan gambut merupakan sumber emisi GRK yang signifikan."

Pada tahun 2020, tingkat kebakaran cukup rendah karena siklus atmosfer La Niña yang lebih dingin dan lebih basah, tapi kebakaran sangat sensitif terhadap kondisi kekeringan yang terjadi selama siklus El Nino (rata-rata terjadi setiap 2-7 tahun sekali)[16]. Kebakaran yang disebabkan oleh kekeringan meningkatkan risiko hukum berupa sanksi dari Pemerintah dan potensi litigasi kabut asap lintas batas yurisdiksi. Pemerintah Singapura, misalnya, telah memulai penyelidikan terhadap beberapa pemasok kayu pulp dari grup pesaing APRIL, Asia Pulp & Paper (APP), atas kerugian terkait kabut asap berdasarkan Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas Singapura atau Transboundary Haze Pollution Act (THPA).[17]

Gambar 2 – Risiko Material Ganda pada Rantai Pasok APRIL

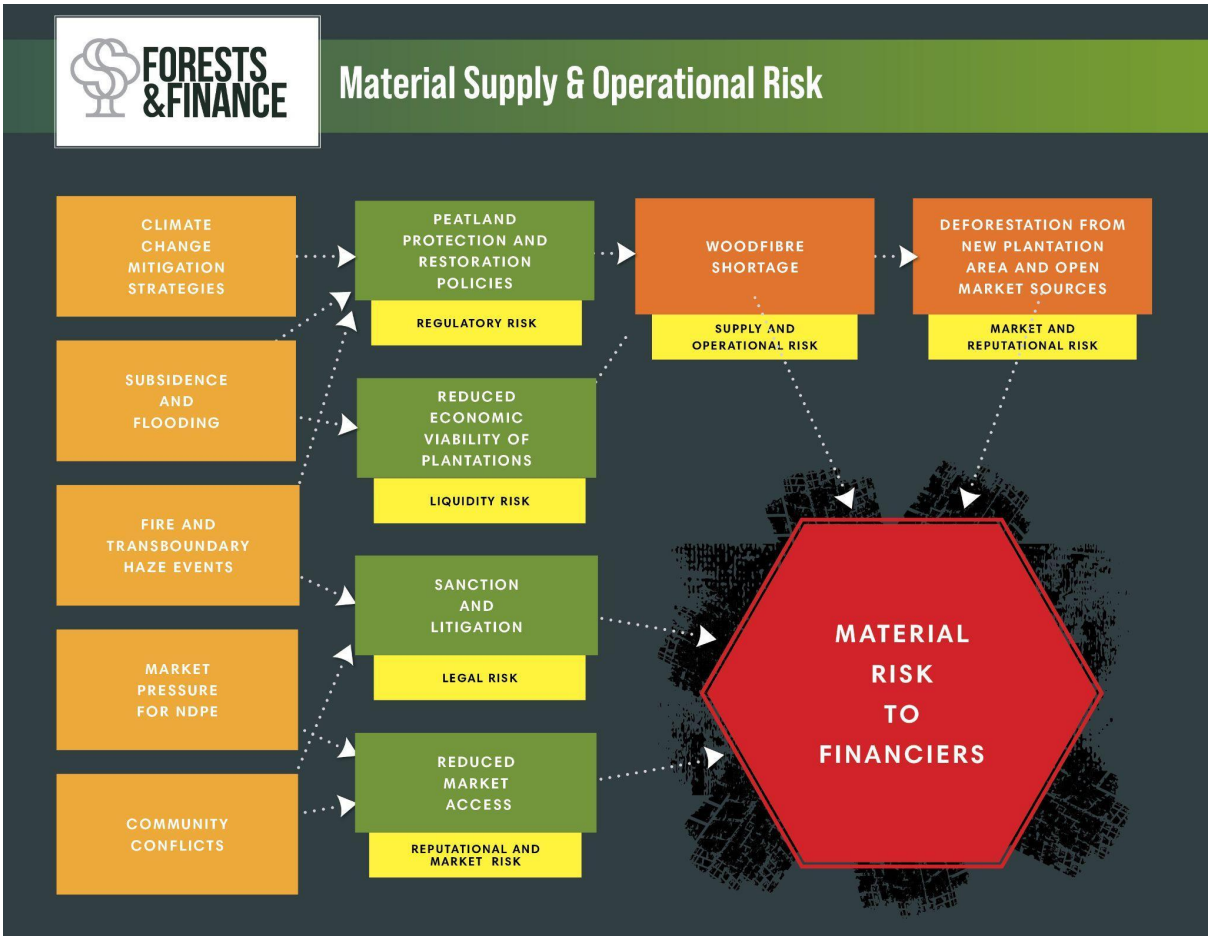

B. Risiko Regulasi pada Pasokan Serat Kayu

Kebijakan Pemerintah untuk mengatasi masalah emisi nasional dan mencegah kebakaran dan kabut asap dengan melindungi dan memulihkan lahan gambut menghadirkan risiko regulasi dan pasokan jangka pendek hingga menengah secara signifikan terhadap pasokan serat kayu APRIL.

> **"Pemohon [APRIL] menghindari kewajiban hukumnya untuk melindungi ekosistem gambut...Mereka ingin semuanya berjalan seperti biasa meskipun peraturan kami secara jelas mengamanatkan perlindungan gambut" –**
> Bambang Hendroyono, Sekretaris Jenderal,
> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, 2017

Hal ini terjadi pada tahun 2016, ketika Pemerintah mengubah peraturan tentang pengelolaan lahan gambut, kemudian mengharuskan perusahaan untuk lebih luas lagi melindungi lahan gambut di dalam konsesi mereka. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia menetapkan sekitar 27% dari wilayah konsesi pemasok

APRIL sebagai zona perlindungan gambut, dan melarang penanaman di atas lahan itu.[18] Grup APRIL meresponnya dengan gugatan terhadap kebijakan Pemerintah itu, meski kemudian ditolak oleh Pengadilan.[19] Setelah itu, dikabarkan juga bahwa APRIL menolak mematuhi perintah kementerian dengan alasan bahwa hal tersebut akan menjadi pukulan berat bagi kegiatan produksinya.[20] Peraturan Menteri LHK tahun 2016 ini kemudian dilemahkan oleh tekanan dari pihak industri, yang memungkinkan perusahaan memiliki lebih banyak keleluasaan untuk menentukan area perlindungan mereka.[21] Namun, bukan tidak mungkin pengaturan yang lebih ketat seperti pada tahun 2016 dapat diterapkan kembali jika kebakaran hebat di masa depan terjadi lagi. Tabel 1 memberikan perkiraan bagaimana pasokan serat kayu APRIL akan terpengaruh oleh peraturan menteri tahun 2016 itu.

Peraturan perlindungan gambut juga memunculkan risiko likuiditas jangka menengah hingga panjang karena perkebunan yang tidak layak secara ekonomi menjadi aset terdampar pada neraca APRIL (tergantung pada penurunan nilai secara dini, devaluasi, atau terkonversi menjadi kewajiban).

Tabel 1 - Perkiraan Hilangnya Pasokan Serat Kayu dari Penghentian Lahan Gambut Lindung di Hutan Tanaman Industri APRIL – menurut aturan pada tahun 2016 [22]

Proporsi Penghentian Lahan Gambut Lindung		Hilangnya Lahan yang telah Ditanami
25%	40.742 ha	7%
50%	81.485 ha	13%
75%	122.227 ha	20%
100%	162.969 ha	27%

APRIL menyatakan bahwa peta indikatif lahan gambut 2016 “digantikan oleh peta definitif yang diterbitkan oleh KLHK pada tahun 2019 yang menjadi dasar bagi rencana kerja yang disetujui Pemerintah untuk wilayah-wilayah tersebut. Kegiatan operasional APRIL di lahan gambut sepenuhnya sesuai dengan regulasi di Indonesia dan pengelolaan lahan gambut yang bertanggung jawab dan berbasis ilmiah versi APRIL.”

C. Penurunan Permukaan Tanah dan Kelayakan Ekonomi

Turunnya permukaan tanah dan banjir di area lahan gambut di hutan tanaman industrinya juga menghadirkan risiko jangka panjang terhadap pasokan serat kayu APRIL. Sebuah studi tahun 2015 oleh Deltares, *konsultan yang pernah disewa oleh APRIL*, memperkirakan bahwa beberapa anak perusahaan dan konsesi Hutan Tanaman Industri afiliasi APRIL akan sangat sering kebanjiran dan mencapai batasnya pada tahun 2039. Kondisi ini pada akhirnya akan menyebabkan konsesi tersebut menjadi tidak layak secara ekonomis; dan bukan tidak mungkin menjadi lahan terdampar. Luas area yang terkena dampak cukup luas, yaitu sekitar 40% dari luas Hutan Tanaman Industri PT Riau Andalan Pulp & Paper; anak perusahaan utama APRIL.[23]

Menanggapi analisis di atas, APRIL menyatakan bahwa “*prediksi banjir yang dibuat oleh Deltares menunjukkan risiko jangka pendek atas banjir akut (yaitu hari-ke-minggu), bukan risiko berupa genangan yang parah atau permanen di daerah tersebut*”. APRIL menolak

mengungkapkan perhitungan lengkap mereka terkait risiko banjir yang dihadapi oleh tanaman di lahan gambutnya.

D. Dampak Produktifitas dari Naiknya Permukaan Tanah

APRIL tidak dapat mengurangi dampak kegiatan operasionalnya terhadap risiko iklim, kebakaran, dan penurunan muka tanah, dan di sisi lain terus mempertahankan ketergantungannya saat ini pada tanaman di lahan gambut. Studi Deltares menyimpulkan bahwa "*perbaikan pengelolaan air [di area lahan gambut dalam areal hutan tanaman industri] dapat dilakukan, namun tidak terlalu berarti – dalam mengurangi tingkat penurunan muka tanah dan kehilangan karbon"*. Sekelompok ilmuwan lahan gambut yang ditugaskan oleh APRIL - Kelompok Kerja Ahli Gambut Independen (IPEWG) - menyimpulkan bahwa penurunan muka tanah dan tingkat emisi dapat dikurangi hingga 25-30% melalui peningkatan permukaan air tanah sesuai dengan target Pemerintah, yaitu 40cm.[24] Namun, APRIL belum mendukung langkah ini. Pada tahun 2019, tim peneliti APRIL melaporkan kepada IPEWG bahwa data menunjukkan "muka air tanah yang tinggi memperlambat pertumbuhan awal tanaman dan kelangsungan hidup tanaman tersebut" yang kemudian berakibat pada "pertumbuhan dan hasil akhir yang jauh lebih rendah". Laporan tersebut juga menyebut bahwa data awal menunjukkan "tinggi pohon tanaman yang tumbuh pada muka air tanah 40cm secara signifikan lebih rendah dari yang tumbuh pada 60cm atau 80cm."[25]

Penelitian APRIL tegas menyatakan bahwa menaikkan muka air ke tingkat yang aman untuk mengurangi emisi, risiko kebakaran, dan penurunan permukaan tanah akan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap produktivitas tanaman industrinya.

Menanggapi pertanyaan kami tentang pengelolaan muka air tanah, APRIL berkomentar bahwa mereka "*saat ini sedang memantau dampak pertumbuhan tanaman di berbagai kedalaman muka air*." Selanjutnya, disebutkan bahwa "*kedalaman muka air tanah rata-rata yang optimal di berbagai lanskap berubah sesuai dengan musim, umur tanaman, elevasi lahan gambut, dan jenis tanah gambut. Tingkat penurunan muka air tanah dan strategi pencegahan kebakaran APRIL yang dilaporkan kepada publik sepenuhnya selaras dengan praktik pengelolaan terbaik lahan gambut*".

Alih-alih menghentikan secara bertahap penanaman di lahan gambut yang dikeringkan, rencana APRIL untuk memperluas kapasitas pabriknya akan menghasilkan penggunaan lahan gambut yang lebih intensif, memperburuk emisi karbon, penurunan permukaan tanah, maupun risiko kebakaran.

1.2 LEMAHNYA KREDIBILITAS RENCANA PASOKAN BAHAN BAKU KAYU MENINGKATKAN RISIKO DEFISIT SERAT KAYU DAN BERTENTANGAN DENGAN KOMITMEN KEBERLANJUTAN

Secara historis, ini bukan kali pertama APRIL meningkatkan kapasitas pengolahannya melebihi kemampuan hutan tanaman industri yang menjadi pemasoknya. Dampak ekspansi itu pada defisit kayu akan mendorong terjadinya deforestasi, karena pemasok mengkonversi hutan alam demi memperluas areal tanaman yang menjadi sumber bahan

baku serat kayunya.

APRIL merencanakan ekspansi yang menciptakan kebutuhan kayu 22,1 juta meter kubik kayu tiap tahun.[26] Akan tetapi, APRIL tidak mampu menyediakan informasi yang koheren dan kredibel atas rencana pemenuhan kebutuhan kayunya, terutama apabila rencana itu juga harus memastikan agar dampak lingkungan yang ditimbulkan tidak melanggar SFMP 2.0.[27] Tekanan dari ekspansi ini akan membawa risiko operasional dan bahan baku tambahan, karena memaksa APRIL untuk memperluas areal tanaman industrinya dan/atau mengandalkan pemasok jangka panjangnya maupun pasar terbuka yang berisiko tinggi.

A. APRIL Melanggar SFMP 2.0 dengan Klaim 'Pemenuhan Bahan Baku' yang Menyesatkan

Materi komunikasi perusahaan yang menyertai usulan rencana ekspansi APRIL menekankan pada 'pemenuhan bahan baku' serat kayu secara mandiri sebagai upaya pencapaian tujuan keberlanjutan. Artinya hanya akan memasok bahan bakunya dari areal hutan tanaman industrinya sendiri atau perusahaan pemasok dengan kontrak kerjasama jangka panjang (afiliasi). Sebagaimana SFMP 2.0, APRIL berkomitmen untuk "tidak membangun pabrik pengolahan atau mesin *pulp* baru sampai perusahaan mencapai 'pemenuhan bahan baku' serat kayu dari lahan hutan tanaman industrinya. Menurut laporan APRIL sendiri terkait sumber bahan baku, saat ini pemenuhan bahan baku tersebut belum mampu terpenuhi dan masih mengandalkan sumber bahan baku dari pasar terbuka dan impor untuk memenuhi 20% dari kebutuhan serat kayunya (lihat periode tahun 2015-2020, Gambar 3). Meski melanggar SFMP 2.0, APRIL berencana untuk melanjutkan rencana penambahan mesin pengolahan *pulp* yang akan meningkatkan kebutuhan bahan baku pabrik hingga 55%.[28]

Menanggapi fakta terkait belum tercapainya pemenuhan bahan baku secara mandiri, APRIL menjelaskan bahwa perusahaan itu telah mencapai "kemampuan untuk melakukan pemenuhan secara mandiri". "Namun demikian," APRIL melanjutkan penjelasannya, "Kemampuan untuk pemenuhan tidak berarti kami akan meninggalkan pasokan dari pasar terbuka. Menjaga akses terhadap pasokan pasar terbuka, sembari tetap mematuhi SFMP 2.0, adalah bagian dari strategi mitigasi risiko bisnis yang wajar dan rasional dan memungkinkan kami untuk terus mendorong praktik pengelolaan hutan lestari bersama mitra pemasok."

APRIL mengutip kajian tahun 2019 terhadap sumber bahan bakunya yang dilakukan oleh Indufor, lembaga konsultan dari Finlandia, untuk membuktikan bahwa perusahaan itu dapat memenuhi bahan baku serat kayu secara mandiri dan karenanya berkembang secara berkelanjutan[29]. Pernyataan ini menyesatkan karena penilaian dilakukan hanya terhadap kapasitas yang ada sebelum usulan peningkatan, sehingga tidak menjawab persoalan kemampuan APRIL untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu yang sedang direncanakan untuk ditingkatkan hingga 55%. Ketika ditanyakan responnya terkait hal ini, APRIL menyatakan bahwa penilaian Indofur "*memokuskan pada… sistem informasi pengelolaan hutan, metode inventarisasi hutan dan model pertumbuhan*" dan "*menyimpulkan bahwa tidak ada kesalahan material… Perubahan kapasitas produksi tidak akan mempengaruhi simpulan Indofur*."

Gambar 3 - Pasokan Serat Kayu untuk Pabrik Pengolahan APRIL di Kerinci, 2015-2020

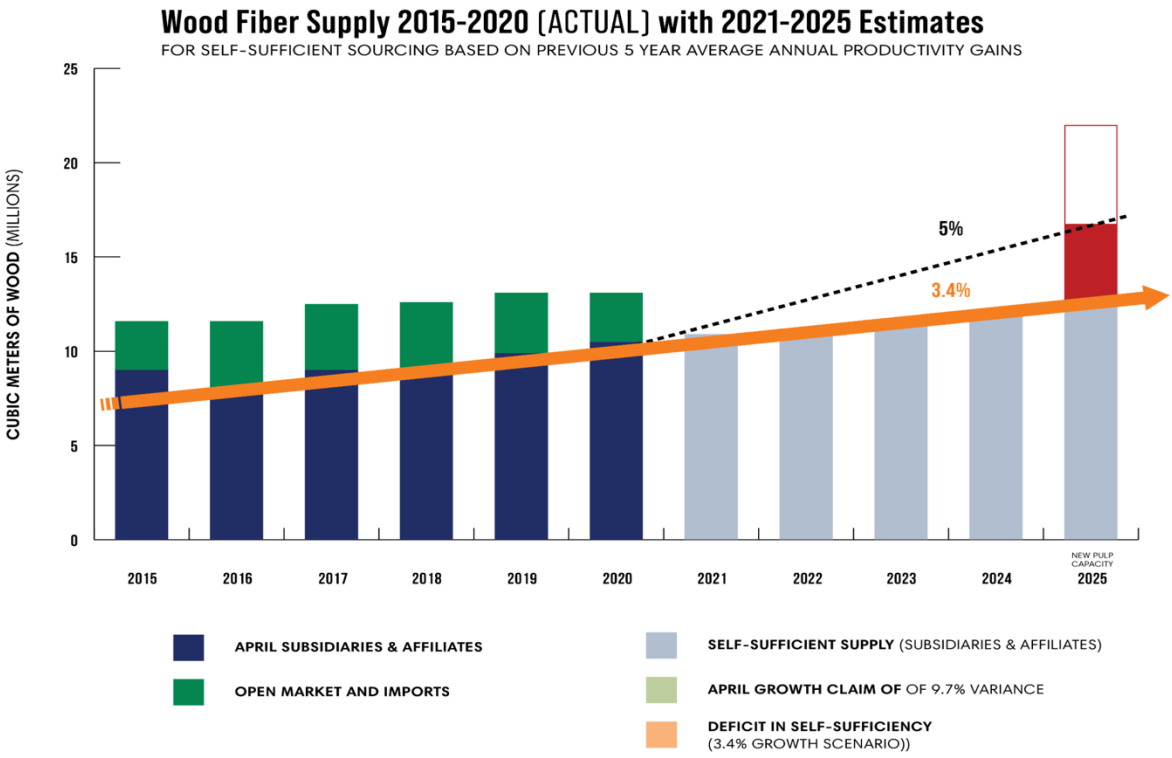

Namun demikian, kami berpendapat, perubahan kapasitas produksi itu akan juga mempengaruhi simpulan Indofur yang menyatakan bahwa, “Pada tahun 2024, pabrik pengolahan RAPP milik APRIL akan mencapai pemenuhan bahan bakunya secara mandiri.” Laporan Indufor memberikan simpulan dengan persyaratan untuk menjadi catatan penting bahwa “rentang waktu yang menjadi targetnya sangat ketat dan tidak memberikan ruang sedikitpun bagi adanya asumsi bahwa pengembangan pertumbuhannya akan menghadapi persoalan”. Perhitungan ini pun sangat menggantungkan metode pada optimalnya permukaan air tanah bagi pertumbuhan tanaman di lahan gambut, yangmana bertolak belakang dengan upaya mengurangi risiko kebakaran dan emisi karbon.[30] Apabila penilaian yang dilakukan Indufor menemukan bahwa pemenuhan bahan baku kayu APRIL kesulitan untuk memenuhi kebutuhan serat kayu saat ini hingga tahun 2024, akan sangat kecil kemungkinannya bagi Indufor untuk melihat bahwa APRIL dapat memenuhi kebutuhan serat kayu yang 55% lebih besar.

Indikasi bahwa APRIL menyalahgunakan penilaian yang dilakukan oleh Indofur untuk membuat ekspansi pabrik seolah memenuhi SFMP 2.0, seharusnya dapat dipertanyakan oleh industri perbankan dan investor. Klaim APRIL terkait dengan pemenuhan bahan baku secara mandiri tidak merefleksikan kemampuan grup usaha itu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pabriknya, yang menunjukkan risiko operasional dan pasokan kayu yang tinggi.

B. APRIL Memperlebar Defisit Pemenuhan Bahan Baku Serat Kayu

APRIL mengklaim bahwa perusahaan itu dapat memenuhi permintaan yang timbul dari adanya peningkatan kapasitas melalui penambahan produktivitas di hutan tanamannya, dengan memproyeksi pertambahan 50% produktivitas pada dekade yang akan datang. Bahkan apabila pertambahan produktivitas ambisius ini terpenuhi, pasokan bahan baku mandiri itu tetap akan kekurangan 8,7 juta meter kubik atau sekitar 39% dari total kebutuhan bahan baku setelah peningkatan kapasitas pengolahan terpasang pada tahun 2025 (lihat 'Skenario prediktif APRIL', Gambar 3). Dokumen analisis dampak lingkungan yang disusun untuk mengkaji risiko peningkatan kapasitas pabrik mengkonfrimasi catatan mengenai pemenuhan bahan baku itu. Menurut skenario yang dibangun APRIL, pasokan dari sumber mandiri seperti "HTI dan kerjasama operasi" hanya akan menutupi 60% kebutuhan bahan baku kayunya, sementara sisa 40% lainnya harus dipenuhi dari pasar terbuka dan impor.

Akan tetapi, peluangnya sangat kecil bagi APRIL untuk mencapai tingkat pertumbuhan produktivitas yang disebutkan di atas. Data pasokan bahan baku perusahaan menyebutkan trajektori pertumbuhan yang lebih besar sekitar 17% dalam lima tahun terakhir (Skenario Garis Tren Historis, Gambar 3).[31] Tren ini akan memberikan gambaran bahwa perusahaan akan kekurangan bahan baku hingga 9,8 juta meter kubik serat kayu, atau defisit sebesar 44%.

Sebagaimana dijelaskan di Bagian 1.1, perkembangan produktivitas tanaman akan juga terganggu oleh mandat kebijakan Pemerintah untuk menghitung dan menjaga tingkat muka air tanah di lahan gambut. Dampak ini dapat juga dipengaruhi oleh berbagai kebijakan lain berkaitan pemulihan lahan gambut dilindungi yang saat ini tumpang tindih dengan setidaknya seperempat areal tanaman yang dimiliki APRIL.

Seluruh pemodelan ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan kapasitas yang diusulkan, APRIL akan meningkatkan ketergantungannya pada sumber bahan baku kayu yang berasal dari pasar terbuka dan impor. Hal ini tentu saja akan semakin menjauhkan APRIL dari tingkat pemenuhan bahan baku secara mandiri yang diumbar. Menanggapi ini, APRIL menyatakan bahwa "Menjaga akses pada pasokan dari pasar terbuka, sembari menjaga kepatuhan SFMP 2.0, adalah strategi mitigasi risiko bisnis yang umum dan wajar untuk dilakukan dan akan memungkinkan perusahaan untuk mendorong praktik terbaik dalam pengelolaan hutan lestari bersama para pemasoknya".

Akan dibahas pada bagian C di bawah, jika tren ini berlanjut maka akan sangat sulit bagi APRIL untuk memenuhi kebutuhan bahan baku serat kayunya yang meningkat, bahkan apabila perusahaan itu menggantungkan diri pada pasokan dari pasar terbuka.

C. Meningkatnya Ketergantungan pada Sumber Bahan Baku yang Berisiko Tinggi

Menurut proyeksi di atas, jika kapasitas pabrik baru terpasang pada tahun 2025, APRIL harus meningkatkan sumber bahan baku kayunya dari pasar terbuka dan impor setidaknya tiga kali lipat. Dari yang awalnya sejumlah 2,6 juta meter kubik pada tahun 2020 menjadi 8,7 juta dan 9,8 juta meter kubik serat kayu. (Lihat Gambar 4).

Gambar 4 - Jumlah total peningkatan pasokan fiber kayu akibat ekspansi pabrik

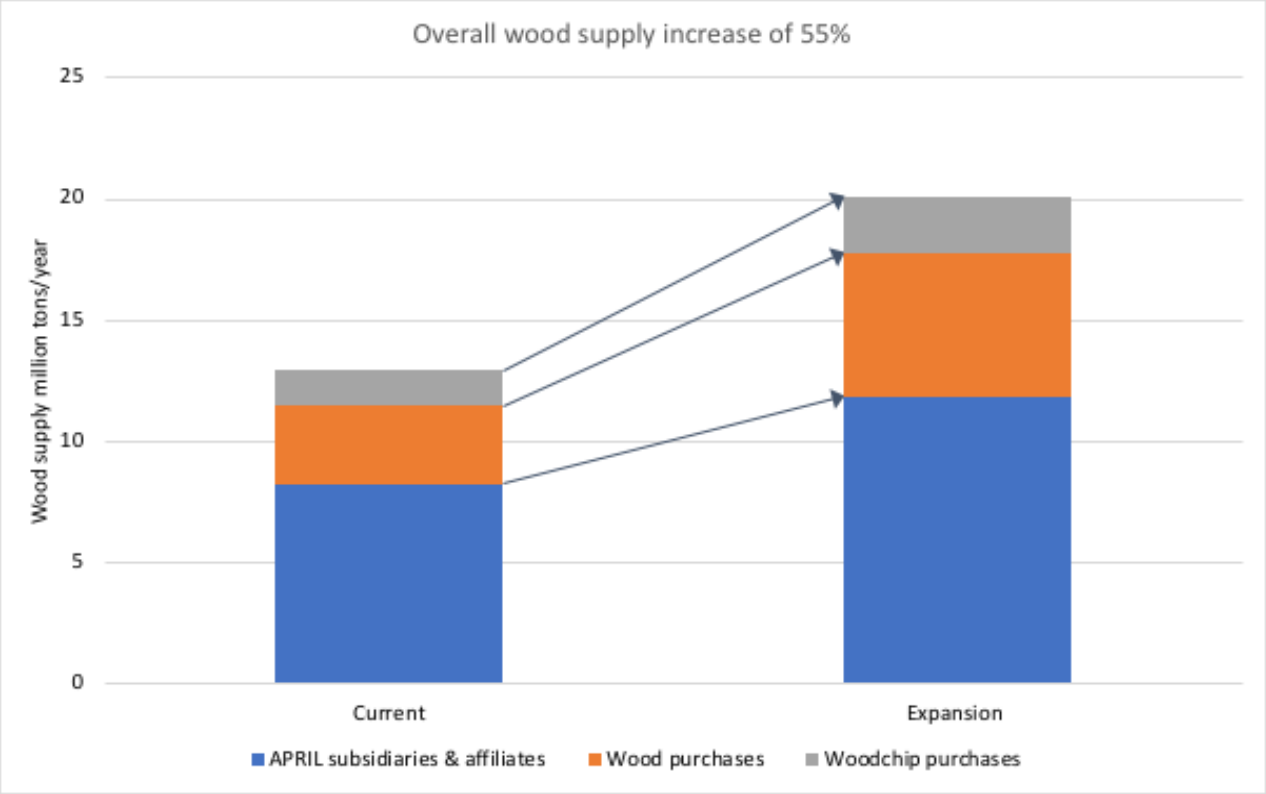

Ketergantungan yang meningkat juga akan mendorong risiko deforestasi dan sosial secara substansial (lihat Bagian 1.3). APRIL menyebutkan bahwa tidak ada bukti suplai bahan kayunya terkait dengan deforestasi. Namun, bukti yang ada pada PT Tanjung Redeb Hutani[32], PT Fajar Surya Swadaya[33], and PT Adindo Hutani Lestari[34], yang merupakan pemasok pasar terbukanya, menunjukkan bahwa APRIL masih terpapar pemasok dengan konversi hutan setelah batas waktu yang disebutkan dalam SFMP 2.0. Analisis data penginderaan jauh menunjukkan bahwa antara 2015 dan 2019, pemasok APRIL mengalami deforestasi lebih dari 60.000 hektare di dalam konsesinya.[35]

Terpaparnya APRIL terhadap risiko deforestasi dari pemasoknya secara terus menerus mengindikasikan ketidakmampuan kebijakan dan standar operasional yang dimiliki APRIL untuk mencegah deforestasi dalam rantai pasoknya.[36] Mereka tidak secara terang-terangan mewajibkan penerapan Pendekatan Stok Karbon Tinggi (*High Carbon Stock Approach*, HCSA) untuk mengidentifikasi area yang akan dikecualikan dari konversi lahan menjadi hutan tanaman di seluruh operasi grup perusahaan, sejak tenggat waktu dalam SFMP 2.0.[37] APRIL menyatakan bahwa sumber serat kayunya harus mematuhi kewajiban “Tanpa Deforestasi” dan telah menghasilkan “*komitmen pemenuhan HCV dan HCS yang signifikan dan komprehensif*”.

Bahkan jika terus membeli dari pemasok pasar terbuka, akan sangat sulit bagi APRIL untuk memenuhi pasokan bahan baku bagi pabrik pengolahan yang kapasitasnya telah ditingkatkan. Dalam lima tahun terakhir, kebutuhan bahan baku kayu APRIL telah meningkat hingga 15%. Jika tren ini berlanjut pada 5 tahun ke depan, APRIL akan

mengalami defisit hingga 6,4 juta meter kubik, atau sekitar 20% dari total kebutuhan serat kayu.

Begitu gamblangnya gambaran risiko kekurangan bahan baku yang terjadi pada APRIL akan mengarahkan perusahaan pada perluasan area konsesi tanaman industri baru. SFMP 2.0 memang memungkinkan penambahan lahan yang sebelum tahun 2015 telah dikonversi dari hutan, jika penjual lahannya tidak 'dengan sengaja' membuka hutan dan atau gambut atau apabila lahannya tidak dialokasikan sebagai lahan yang memiliki nilai karbon tinggi atau nilai konservasi tinggi (HCV dan HCS).[38] Pemenuhan defisit kayu ini akan membutuhkan penambahan areal tanaman antara 216.000 dan 385.000 hektare lahan, tergantung pada produktivitas tanaman.[39]

Merespon analisis ini, APRIL menyebutkan "Kami tidak memiliki rencana untuk menambah izin hutan tanaman industri baru atau memperluas konsesi yang ada saat ini. Kebutuhan serat kayu yang timbul dari usulan peningkatan kapasitas produksi akan dipenuhi dari tanaman serat kayu yang dimiliki APRIL berdasarkan konsesi yang ada saat ini dan mitra kerjasama jangka panjang kami, maupun pemasok di pasar terbuka." Bagaimanapun klaimnya, sulit untuk membayangkan APRIL akan mendapatkan lebih banyak kayu tanpa mengamankan lahan tanaman baru di hutan alam dan/atau mendapatkan pasokan dari pemasok pasar terbuka yang memiliki keterkaitan dengan deforestasi.

Terlepas dari pemasok kayu yang ada saat ini, APRIL terhubung melalui personil dan catatan kepemilikan badan usaha dengan berbagai konsesi hutan tanaman industri yang terkait dengan deforestasi, tetapi belum aktif sebagai pemasok APRIL. Relasi ini, menurut laporan Aidenvironment[40], meliputi sebuah grup dengan enam perusahaan yang berada di bawah bendera Grup Nusantara Fiber yang telah mengkonversi hutan seluas 26 ribu hektare di Kalimantan selama lebih dari 5 tahun. RGE, grup usaha yang mengendalikan APRIL, membantah memiliki relasi dengan enam perusahaan ini. Laporan ini juga menghubungkan APRIL dengan sebuah konsesi di Papua Barat yang meliputi hutan seluas 87.225 hektare.[41] Apabila APRIL mulai mengembangkan areal tanaman baru untuk mendukung pengolahan yang lebih besar, areal berhutan di Kalimantan dan Papua seperti ini adalah yang pertama kali dalam keadaan terancam.

1.3 PELANGGARAN TERHADAP HAK DAN RISIKO-RISIKO SOSIAL YANG DITIMBULKANNYA

Rantai pasokan serat kayu APRIL juga mengandung risiko sosial terkait meluasnya konflik dengan masyarakat, dampak yang ditimbulkannya pada lahan pertanian dan tanaman pangan, serta dugaan kekerasan dan kriminalisasi oleh perusahaan. Sebuah studi tahun 2019 mengungkapkan bahwa setidaknya 72 komunitas terlibat konflik aktif dengan afiliasi atau pemasok APRIL di provinsi Riau (saja).[42] Ini adalah konflik yang dijanjikan APRIL untuk diselesaikan sebagaimana kebijakan keberlanjutan SFMP 2.0 tahun 2015.[43]

Kantor akuntan KPMG, yang ditunjuk oleh APRIL untuk meninjau kinerja Kebijakan Keberlanjutannya, menunjukkan bahwa antara 2017 hingga 2019, grup tersebut tidak membuat kemajuan signifikan dalam menyelesaikan konflik, dengan area tak berkonflik turun hanya 1% menjadi 103.000 hektare, dengan jumlah penggugat yang justru bertambah.[44]

Menanggapi persoalan itu, APRIL menyatakan bahwa Laporan Keberlanjutan 2020 mencatat total area dengan sengketa tanah yang belum terselesaikan turun dari 28.249 hektare pada 2019 menjadi 22.985 hektare pada 2020. Lebih lanjut, “Sengketa tanah adalah perkara yang rumit dan membutuhkan waktu untuk diselesaikan demi kepuasan semua pihak.…area yang diklaim itu tidak dapat kami garap hingga mencapai titik bahwa klaim tersebut diselesaikan secara menyeluruh dan adil. Oleh karenanya, kami juga berkepentingan agar klaim ini diselesaikan secepat mungkin.”

APRIL juga mengklaim akan menyampaikan semua penilaian Pendekatan Stok Karbon Tinggi (*High Carbon Stock Approach*/HCSA) yang belum selesai pada Desember 2022, termasuk yang berkaitan dengan persyaratan sosialnya. Jika diterapkan, pendekatan ini akan mensyaratkan dilindunginya hak masyarakat untuk memberikan persetujuan atau penolakannya, sebagaimana Prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) terhadap ekspansi yang diusulkan. Syarat ini berlaku untuk areal konsesi yang tumpang tindih dengan tanah yang dikuasai oleh masyarakat, baik itu yang sudah berjalan maupun jika ada konsesi baru di masa depan. Hingga saat ini, tidak ada bukti bahwa APRIL memulai proses tersebut dan memastikan prinsip FPIC dijalankan.

Ekspansi serat kayu yang direncanakan APRIL kemungkinan besar akan menyebabkan anak-anak perusahaan dan pemasoknya terpapar dengan lebih banyak konflik lahan. Konflik yang sedang berlangsung dan belum terselesaikan dengan masyarakat setempat yang hidup di sekitar hutan merupakan **risiko operasional, hukum, dan reputasi** bagi Grup APRIL, dan faktor lain yang mengancam pasokan serat kayu dan akses pasar APRIL.

Apa yang terjadi baru-baru ini pada anak perusahaan bubur kertas APRIL, PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL, IDX: INRU) dapat menjadi gambaran bagaimana risiko-risiko yang diuraikan sebelumnya terjadi. Saat ini, TPL sedang berkonflik secara aktif dengan setidaknya 23 kelompok masyarakat adat atas penguasaannya di lebih dari 20.000 hektare lahan.[45] Protes keras masyarakat dan pemerhati lingkungan telah mendorong Pemerintah untuk menutup pabrik sementara pada tahun 1998[46] dan belakangan ini muncul kembali seruan yang sama oleh beberapa masyarakat adat dan komunitas masyarakat yang lebih luas untuk sekali lagi menutup TPL dan bahkan mencabut izin pabriknya.[47]

Pada Juli 2020, KLHK mengurangi konsesi TPL sebesar lebih dari 16.000 ha, untuk menjadikannya sebagai hutan adat.[48] Kemudian di bulan Juni 2021, KLHK mengeluarkan surat keputusan untuk memerintahkan penyelesaian konflik hutan adat dan perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasional TPL, termasuk mengkaji kembali kepatuhan hukumnya.[49] Setelah TPL bersikeras menanam bahan baku *pulp*nya dan mengabaikan hak masyarakat untuk melakukan menggunakan lahannya sendiri, protes dari masyarakat semakin banyak timbul, yang kemudian direspon oleh TPL dengan—lagi-lagi—kekerasan.[50] Lebih dari 90 aktivis dari anggota masyarakat yang dikriminalisasi dan dikenai tindakan kekerasan oleh TPL sejak 1998; yang menunjukkan adanya sejarah pelanggaran HAM yang panjang.[51] Pada tahun 2021, perwakilan masyarakat adat Danau Toba menemui Presiden Joko Widodo untuk menjelaskan persoalan pelanggaran hak-hak masyarakat oleh TPL tersebut. [52]

Menanggapi persoalan konflik sosial yang diuraikan di atas, TPL mengklaim bahwa mereka *"saat ini menghadapi 10 klaim tanah, yang melingkupi lahan seluas 10.384 hektare dan 9 di antaranya telah diselesaikan*". Selanjutnya, perusahaan menyangkal bahwa mereka *"secara tidak adil 'mengkriminalisasi' aktivis atau orang lain melalui kegiatan operasionalnya."*

1.4 BANK YANG MENDUKUNG PEMBIAYAAN UNTUK APRIL

APRIL adalah bagian dari Grup Royal Golden Eagle (RGE), konglomerasi internasional dengan pemegang saham kendali utama Sukanto Tanoto dan beberapa anggota keluarganya. Grup RGE membawahi perusahaan serat kayu lain seperti Toba Pulp Lestari (Indonesia) Asia Pacific Rayon (Indonesia), Sateri Viscose Rayon (China), Asia Symbol (China) dan Bracell (Brazil). Gambar 4 menunjukkan 25 kreditur terbesar RGE untuk bisnis *pulp and paper* -nya (2016 – April 2020).

Pada akhir Agustus 2021, diberitakan bahwa APRIL telah bernegosiasi dengan beberapa bank termasuk ICBC dan CITIC untuk mendapat pinjaman 'terkait proyek keberlanjutan' senilai USD 650 juta, yang dapat diduga berkaitan dengan rencana ekspansi pabriknya saat ini.[53] Beberapa laporan menunjukkan bahwa pinjaman tersebut memiliki kriteria kinerja yang berkaitan dengan aspek-aspek perlindungan lingkungan hidup seperti besaran emisi CO2 dan investasi dalam keberlanjutan produksi serat kayu. Awal tahun ini, anak perusahaan APRIL, Asia Pacific Rayon (APR), yang memproduksi rayon *viscose* di kompleks pabrik yang sama dengan APRIL, mendapatkan pinjaman sindikasi sebesar USD 300 juta untuk ekspansi modal dari konsorsium bank Indonesia dan Korea, termasuk Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Central Asia (BCA), dan Bank PAN Indonesia (Panin).[54]

Gambar 4 - 25 Kreditur Terbesar Grup Royal Golden Eagle untuk Lini Bisnis Bubur Kertas dan Kertasnya (2016 - April 2020 April, dalam juta dolar AS) Sumber: forestsandfinance.org

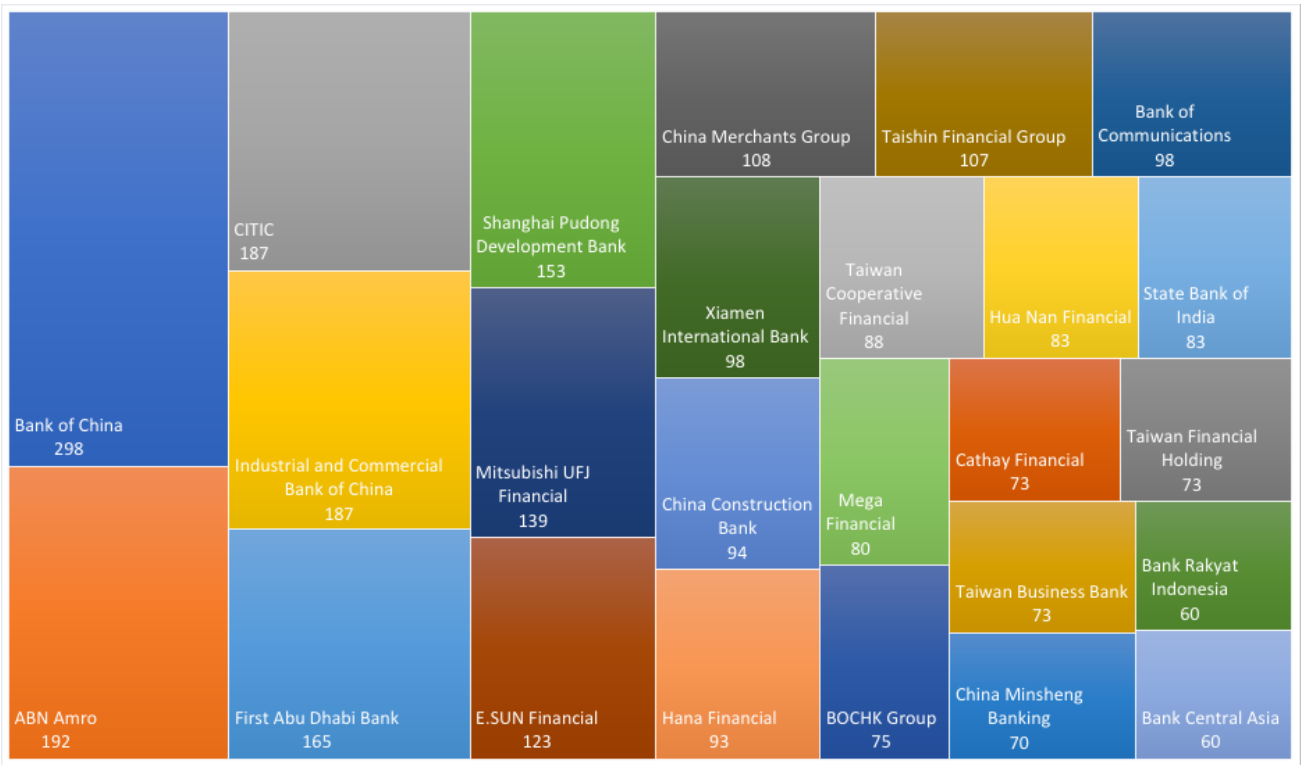

TPL bukan penerima kredit bank yang signifikan dan sebagian besar dibiayai oleh pemegang saham mayoritas: Pinnacle Company Pte Ltd [55], yang pemilik manfaat utamanya diduga adalah Dirut RGE, Sukanto Tanoto.[56] Selain itu, semua produk bubur kertas TPL dijual ke perusahaan-perusahaan dalam grup RGE.[57] Hubungan antara TPL dan RGE sesuai dengan sejumlah kriteria tentang grup perusahaan umum, seperti yang didefinisikan oleh Inisiatif Kerangka Kerja Akuntabilitas (Accountability Framework Initiative).[58] Namun, baik RGE maupun TPL menyatakan bahwa TPL bukan bagian dari grup perusahaan Royal Golden Eagle. Sementara itu, TPL menyebutkan bahwa "*Perusahaan (ini) adalah perusahaan publik di Indonesia dengan Dewan Komisaris dan Manajemen Independennya tersendiri dan bukan bagian dari grup perusahaan Royal Golden Eagle*."

REKOMENDASI

Bagi bank yang telah atau sedang mempertimbangkan untuk memberikan pinjaman bagi Grup APRIL:

- Menahan diri untuk memberikan pembiayaan baru dan/atau terlibat dengan nasabah ini sampai standar berikut terpenuhi:

  - **Memitigasi risiko iklim, kebakaran, dan kabut asap** dengan mewajibkan APRIL untuk:

    - Mengumumkan inventarisasi emisi gas rumah kaca yang dilakukan oleh CarbonTrust pada tahun 2019, dan memastikan bahwa daftar tersebut mencakup semua emisi perubahan penggunaan lahan.
    - Menyajikan rencana terikat waktu untuk penghentian kegiatan perkebunan secara bertahap di lahan gambut yang dikeringkan.
    - Mengumumkan rencananya menuju *'net zero*' atas "penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan" dalam laporan berkala yang tersedia bagi publik, sebagai tujuan APRIL 2030. Laporan ini harus juga mencakup metode verifikasi independen atas pengurangan dan penyerapan emisi yang diklaimnya.

  - **Memitigasi risiko deforestasi** dengan mewajibkan APRIL untuk mengungkapkan rencana pasokan kayu jangka panjang yang kredibel dan ditinjau secara independen dengan menggabungkan semua persyaratan serat kayu untuk memenuhi kebutuhan pasokan kayu dari proposal perluasan pabrik bubur kertas. Memastikan rencana pasokan kayu mencakup hilangnya produktivitas dari: a) kenaikan muka air tanah di lahan gambut dan penghentian perkebunan di lahan gambut yang dikeringkan, b) penyelesaian konflik lahan.

    Mensyaratkan APRIL untuk merevisi kebijakan dan SOP untuk secara terbuka mewajibkan kepatuhan terhadap Pendekatan Stok Karbon Tinggi (HCSA) bagi semua pengembangan baru yang melibatkan perubahan penggunaan lahan di dalam konsesinya dan anak perusahaan, afiliasi, dan pemasok pasar terbuka mereka. Persyaratan ini harus diberlakukan sejak tanggal batas 2015, sesuai SFMP 2.0.

  - **Memitigasi risiko sosial:** Pastikan APRIL memenuhi hak masyarakat adat dan memenuhi prinsip PADIATAPA (persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan), menyelesaikan pertikaian sesuai dengan norma HAM internasional dan praktik terbaik.[59] Hal tersebut termasuk penghormatan bagi anggota msyarakat yang menolak adanya perkebunan di atas tanah mereka; meskipun bila tanah tersebut telah ditanami. Minta APRIL melakukan dan menerbitkan peta konflik sosial dan bersetuju untuk mencari penyelesaiannya secara jelas dan transparan.[60]

  - **Mengadopsi dan melaksanakan Kebijakan NDPE** yang meliputi seluruh sektor bubur kertas dan kertas. Kebijakan ini mesti membatasi pembiayaan hanya bagi nasabah yang memenuhi sertifikasi Full Forest Management Certification dari Forest Stewardship Council (FSC).

Untuk Investor Perbankan

- Melibatkan diri dengan lembaga keuangan yang saat ini sedang mempertimbangkan untuk membiayai ekspansi APRIL, atau memiliki hubungan pembiayaan dengan Grup APRIL, untuk memastikan bahwa mereka sepenuhnya menyadari risiko keuangan material yang dihadapi.

- Meminta lembaga keuangan untuk mengadopsi kebijakan tegas dan terbuka atas ‘No Deforestation, No Peatland, No Exploitation’ (NDPE) yang mencakup sektor bubur kertas & kertas

[1] IUCN, *'Peatlands and climate change',* https://bit.ly/3xgXfhn
[2] World Resources Institute, *To Save Indonesia's carbon-rich peatlands, start by mapping them,* https://bit.ly/3wokfe2; Warren et al, 2017, 'An appraisal of Indonesia's immense peat carbon stock using national peatland maps: uncertainties and potential losses from conversion', https://bit.ly/3qU5f6E
[3] UNFCCC, Second Bienneal Report 2018, hal. 5, https://bit.ly/3rRlZfh
[4] WRI, 2020, *World's Top Emitters,* https://bit.ly/2UIh5Vm
[5] NDC 2019 hal. 180, https://bit.ly/3rV0NF1; juga Jakarta Post, 26 Juli 2021, *'Indonesia aims to transform forests in carbon sink',* https://bit.ly/2UUth5B
[6] Perpres No. 120/2020 tentang BRGM Pasal 4(1); NDC Indonesia yang sudah di-update 2021, hal. 24.
[7] Perpres No. 120/2020 tentang BRGM Pasal 4(1); Mongabay, 5 Jan 2021, *'Indonesia renews peat restoration bid to include mangroves, but hurdles abound',* https://bit.ly/3rBUwxO
[8] Dihitung menggunakan perkiraan geospasial dari lahan yang telah ditanami yang terletak di lahan gambut, dari data Trase.earth. Emisi dari ekuivalen CO2e didapat dari Hooijer et al (2010), *'Current and future emissions from drained peatland in SE Asia',* https://bit.ly/3saLTdP. Dokumen ini memperkirakan ekuivalen CO2 dari 73 tons/ha/year setelah 5 tahun pertama. Estimasi yang kami lakukan tidak memperhitungkan penurunan permukaan tanah di lahan ditanami di luar lahan gambut dalam konsesi, dengan asumsi semua lahan sudah dikonversi lebih dari 5 tahun. Ke-2 faktor ini menggunakan estimasi yang konservatif. Perkiraan emisi Austria tahun 2018 adalah 67,85 megatons ekuivalen CO2, lihat data CarbonWatch, https://bit.ly/3fYOxhX.
[9] Greenpeace, September 2019, *'Indonesian Forest Fires Crisis: Palm oil and pulp companies with largest burned land area are going unpunished', https://bit.ly/3hzy1X1.*
[10] APRIL, Sustainability Report 2020, hal. 16
[11]Wilayah terbakar di lahan gambut menggunakan data dari Trase.earth. Emisi CO2 dihitung menggunakan 842 Mg/ha ekuivalen CO2 dengan deviasi standar 466 Mg ha; dari Vasquez et al (2020), *'Estimating Greenhouse Gas Emissions from Peat Combustion in Wildfires on Indonesian Peatlands',* Global Biogeochemical Cycles, https://bit.ly/3xlMhaj
[12] Kapasitas sebesar 21GW akan segera beroperasi diperkirakan melepas 107 juta ton ekuivalen CO2/tahun, lihat Trend Asia, 8 Juni 2021, https://bit.ly/3t9wQSk
[13] APRIL, Sustainability Report 2020, hal. 44, https://bit.ly/3AneLCO
[14] Menggunakan rata-rata nilai tengah dari perkiraan kami atas emisi 5 tahun dari paparan lahan gambut APRIL, 19.5 megatons.
[15] SFMP 2.0, Bagian IV.
[16] National Atmospheric and Oceanic Association, '*What are El Niño and La Niña?',* https://bit.ly/3DHRyxm.
[17] Pertanyaan di parlemen Singapura menegaskan bahwa kasus tetap terbuka ke PT Bumi Mekar Hijau, PT Bumi Andalas Permai, PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries dan PT Rimba Hutani Mas. Lihat Singapore Parliamentary Debates, 04 March 2020, vol.94 at cols 7-8 (Assoc Prof Walter Theseira), https://bit.ly/3BxwasX.
[18] Mongabay, 3 Desember 2017, '*Pulp and paper giant sues Indonesian government over peat protection obligation',* https://bit.ly/3ATtoP9.
[19] Rilis KLHK: Tuntutan PT RAPP ditolak, APRIL diwartakan gagal dalam aksi legalnya. Lihat: https://bit.ly/3jCLKxj. Keputusan Pengadilan ini dikunci untuk alasan kerahasiaan https://bit.ly/2WF1N4K.
[20] Mongabay, 3 Desember 2017, '*Pulp and paper giant sues Indonesian government over peat protection obligation',* https://bit.ly/3ATtoP9.
[21] Eyes on the Forest, Agustus 2019, *'Peat fires raging as Indonesian government turns back the clock on restoration'.*
[22] Wilayah lindung menurut Peta sesuai SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 yang diterbitkan KLHK. Wilayah yang sudah ditanami berdasarkan Gaveau et al. 2021 melalui Trase.
[23] Sekitar 137.000 ha luasan PT RAPP terletak di lahan gambut Semenanjung Kampar. Luas konsesi total PT RAPP adalah 338.246 ha.
[24] Meningkatkan muka air tanah = mengurangi rerata kedalaman air (kedalaman di bawah permukaan). Mereka menyarankan mengurangi rerata muka air tanah dari dari 70 cm menjadi 40 cm, lihat Evans et al., '*Rates and spatial variability of peat subsidence in Acacia plantation and forest landscapes in Sumatra, Indonesia',* Desember 2018, https://bit.ly/2WTg1yX.
[25] Lihat catatan ringkas Pertemuan IPEWG 13, 2019, hal. 4, https://bit.ly/3jxkSxl. Untuk latar belakang pertukaran terkait produktivitas lihat Laurén et al, '*Environmental Impacts of Acacia Plantation in Drained Tropical Peatland- Description of Plantation Simulator',* Forests 2021, 12(3), 312, https://bit.ly/2VcdYWn.

[26] Dokumen analisis dampak lingkungan menyebutkan bahwa kebutuhan serat kayu akan mencapai 20.110.009 ton. Dengan rasio konversinya 1 ton kering = 1,1 meter kubik kayu, maka kebutuhan serat kayu akan mencapai 22.121.000 meter kubik.
[27] SFMP 2.0. I (j) menyatakan bahwa APRIL tidak akan menambah lahan konsesi baru kecuali untuk kebutuhan konservasi.
[28] PT Riau Andalan Pulp and Paper, 2020, *Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) Rencana Kegiatan Pengembangan Riau Komplek,* [Environmental Impact Assessment Report].
[29] Korespondensi dari APRIL, 31 Agustus 2021, "APRIL telah menunjukkan kemampuannya untuk mencapai swasembada serat yang dapat meyakinkan Komite Pemangku Kepentingan (Stakeholder Advisory Committee, SAC), berdasarkan penilaian lengkap yang dilakukan oleh Indufor. Pencapaian ini menunjukkan bahwa kami memiliki modal dasar yang stabil dan sumber bahan baku serat kayu yang dapat diandalkan yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis kami secara berkelanjutan."
[30] Bahkan International Peat Expert Working Group (IPEWG) APRIL mengakui bahwa pengelolaan permukaan air tanah yang lebih tinggi untuk mengurangi penurunan muka tanah dapat mengurangi produktivitas tanah. Catatan pertemuan IPEWG pada bulan Oktober 2019 menyebutkan bahwa tim peneliti APRIL menemukan bahwa "*High WT [water table] lowers early growth and survival as well as impacts tree form (lean) [...] WT impact on growth and yield: only initial data available but 40 cm WT tree heights are significantly lower than 60 to 80 cm WT*", lihat catatan Pertemuan IPEWG 13, hal. 4, https://bit.ly/38BRnoY
[31] Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) dilaporkan oleh PT RAPP, 2015-2020.
[32] Forest Hints, 08 November 2018, '*APRIL supply chain still tied to HCS forest clearing',* https://bit.ly/3kNtpwG.
[33] Mongabay, 19 Desember 2019, *'FSC complaint filed against pulpwood firms tied to Indonesia's richest man',* https://bit.ly/3kOTXhn
[34] Environmental Paper Network, 2020, '*Sustaining Deforestation: APRIL's links to PT Adindo undercut "No Deforestation Pledge",* https://bit.ly/2WPmMlw.
[35]Data deforestasi dari Trase.earth dan menunjukkan deforestasi seluas 61.833 ha. https://bit.ly/3DOuqgS; lihat juga Trase Insights, 23 Feb 2021, *Indonesia pulp sector's progress on deforestation hangs in the balance',* https://bit.ly/3hoBWph.
[36]Kebijakan APRIL gagal menyesuaikan diri dengan *HCSA Toolkit* untuk dilaksanakan dengan praktik terbaik, karena beberapa hal berikut: 1) kebijakan itu tidak secara eksplisit mensyaratkan penerapan HCSA untuk mengidentifikasi area yang akan dikecualikan dari konversi di seluruh kegiatan operasinya sejak tenggat waktu tahun 2015; 2) kebijakan itu juga tidak mensyaratkan penggunaan *Integrated HCV-HCSA Manual* dan penilai yang disetujui oleh Assessor Licensing Scheme (ALS) sejak November 2017; 3) kebijakan itu menggunakan istilah-istilah '*High Conservation Value Forests* (HCVF)' dan '*HCS areas*' yang tidak konsisten dengan istilah yang digunakan dalam HCSA. Celah ini problematis karena APRIL mendapatkan sumber bahan bakunya dari pemasok atau grup usaha yang telah merusak lahan yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi sejak Juni 2015 dengan memanfaatkan celah dalam penilaian HCV yang tidak mengidenfikasi dan mengesampingkan hutan dengan nilai HCS (lihat Aidenvironment, Agustus 2021 dan Environmental Paper Network, 2020).
[37] KPMG, Report on APRIL Group's Implementation of Sustainable Forest Management Policy, Nov 2020, https://bit.ly/3n873ZS
[38] SFMP 2.0 kriteria I (j) menyebutkan "*APRIL tidak akan memperoleh lahan baru atau izin kehutanan; atau menerima kayu dari lahan pihak ketiga yang memiliki izin, yang mana setelah 3 Juni 2015 penjual dengan sengaja membuka hutan HCV atau HCS atau lahan gambut berhutan. Hal ini tidak berlaku untuk perolehan tanah atau izin untuk tujuan restorasi atau kegiatan konservasi berdasarkan klausul II.d Kebijakan ini.* "
[39] Proyeksi kebutuhan tanaman ini didasarkan pada defisit serat sebesar 8,7 dan 9,6 juta meter kubik dan mencakup kisaran kenaikan tahunan rata-rata (MAI), yaitu tingkat pertumbuhan pohon tahunan rata-rata, antara 25 m3/ha/tahun hingga 40 m3/ha/tahun. Ini mengasumsikan rotasi lima tahun, oleh karena itu hasil kayu berkisar antara 125 m3/ha dan 200 m3/ha. Tanpa memasukkan kayu yang hilang di lapangan atau ketika proses transportasi.
[40] Aidenvironment, 2021, *The industrial tree operations of the Nusantara Fiber Group',* https://bit.ly/3DNcL9t.
[41]PT Kesatuan Mas Abadi adalah konsesi di Papua Barat, lihat Gambar 12, hal. 45 di Aidenvironment, 2021, Operasionalisasi pohon industri dari Grup Nusantara', https://bit.ly/3DNcL9t. .
[42] Environmental Paper Network, 2019, *'Conflict Plantations: Chapter 2',* https://bit.ly/3A5nuJn.
[43] APRIL SFMP 2.0, 2015, Lihat bagian VI '*Respect the rights of Indigenous Peoples and Communities',* https://bit.ly/3CkaCkF.
[44] KMPG, Report on APRIL Group's Implementation of Sustainable Forest Management Policy 2.0, p54, https://bit.ly/3BLjW0x.
[45] Aliansi Gerakan Tutup TPL. 'Aliansi Gerakan Tutup TPL di Tano Batak'. Jikalahari. Mei 2021.
[46] Saat itu namanya PT. Inti Indorayon Utama.

[47] Rainforest Action Network, '*Global Solidarity to Support Indigenous Batak Peoples of Indonesia',*
[48] Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.307/MenLHK/Setjen/HPL.0/7/2020. Perlu diperhatikan bahwa hanya sekitar 2.300 ha yang ditetapkan ulang untuk hutan adat. Artinya kurang dari setengah dari tuntutan masyarakat Pandumaan Sipituhuta yang sebenarnya seluas 5.172 ha. Mayoritas didesain ulang untuk proyek *food estate* pemerintah yang juga bertentangan dengan hak tanah adat.
[49] Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.352/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2021 Tentang Langkah-Langkah Penyelesaian Permasalahan Hutan Adat dan Pencemaran Limbang Industri di Lingkungan Danau Toba. Juni 2021.
[50] Aliansi Gerakan Tutup TPL. '*Aliansi Gerakan Tutup TPL di Tano Batak'.* Jikalahari. Mei 2021.JIkalahari, KSPPM.
[51] Sihotang, et al. "Potret Buram PT TPL di Kawasan Danau Toba: Kekerasan, Kriminalisasi dan Diskriminasi Hukum". BAKUMSU. July 2021.
[52] Sekretariat Presiden, 6 Agustus 2021, '*Presiden Jokowi Terima Aktivis Lingkungan*', https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-terima-aktivis-lingkungan-togu-simorangkir-di-istana/.
[53] Global Capital, 25 Aug 2021, *'APRIL readies debut sustainability-linked loan',* https://bit.ly/3gXOB29
[54] APR Rayon, '*Asia Pacific Rayon Raises US$300 million from national and international affiliated banks',* https://bit.ly/37pqTGW.
[55] Total kewajiban TPL pada tahun 2020 adalah USD 310 juta, di mana USD 262 merupakan 'pinjaman berjangka pinjaman' dari Pinnacle Company Pte Ltd, yang pemilik manfaatnya adalah Sukanto Tanoto.
[56] Lihat bukti kepemilikan manfaat bersama Pinnacle Company Pte Ltd yang dirinci di laporan *'The Macao Money Machine: Profit shifting and tax leakage in Indonesia's pulp exports',* hal. 5, Forum Pajak Berkeadilan, 2019, https://bit.ly/3n5bcOd.
[57] PT Toba Pulp Lestari, Laporan Tahunan 2019, https://bit.ly/3b1L5Br.
[58] Ini termasuk 'pemilik manfaat' dan 'kontrol keuangan'; lihat definisi 'Accountability Framework Initiative' tentang 'grup korporasi', https://bit.ly/2WORdby.
[59] Praktik terbaik termasuk kepatuhan pada Persyaratan Sosial HCSA dan Pedoman Pelaksanaannya
[60] Prosedur resolusi konflik dan remediasi untuk kerugian harus disepakati dengan perwakilan pilihan seluruh masyarakat yang terkena dampak dan selaras dengan norma-norma HAM, termasuk Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGP)